

**IMPLEMENTASI PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Tesis

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

NURBAEDAH

NIM 927.002.19.009

**PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KEDIRI
2021**

PERSETUJUAN

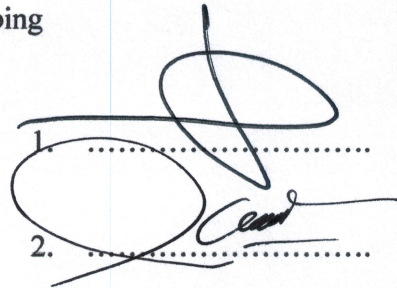
Tesis ini telah disetujui pada ujian tesis
Pascasarjana IAIN Kediri.

Dosen Pembimbing

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI.

Dr. H. Ilham Tohari, MHI.

1.
2.

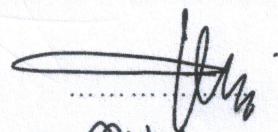
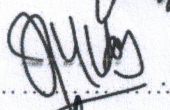

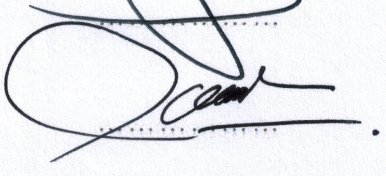


Kediri, 16 Juni 2021

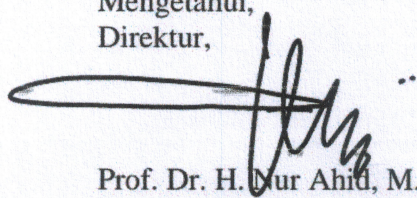
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI” ini telah diuji dan setelah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) Pascasarjana IAIN Kediri pada tanggal 28 Juni 2021

Tim Penguji:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Nur Ahid., M.Ag. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. | (Penguji Utama) |  |
| 3. Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI. | (Penguji 1) |  |
| 4. Dr. H. Ilham Tohari, MHI. | (Penguji 2) |  |

Kediri, 28 Juni 2021
Mengetahui,
Direktur,


Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURBAEDAH

NIM : 927.002.19.009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam
Pembagian Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama
Kota Kediri

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 16 Juni 2021

Hormat saya

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'FE5D6AJX276539439' is visible at the bottom of the stamp.

NURBAEDAH

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURBAEDAH

NIM : 927.002.19.009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam
Pembagian Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama
Kota Kediri

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji ujian tesis pada tanggal 28 Juni 2021

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana IAIN Kediri setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2021

Kediri, 30 Juni 2021

Yang menyatakan,



NURBAEDAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kediri”.

Terimakasih penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, diantaranya :

1. Dr. H. Nur Chamid, MM. selaku Rektor IAIN Kediri
2. Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kediri
3. Dr. A. Halil Tahir, M.H.I. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Kediri
4. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Kediri
5. Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana IAIN Kediri yang telah membimbing, mengajar, dan memberikan ilmu pengetahuan pada penulis.
7. Ketua dan segenap staf Pengadilan Agama Kota Kediri atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan kesediaannya untuk wawancara
8. Kepada kedua orang tua tercinta Ibu Mesinah (almh) dan Bapak Masturi (alm) dan kedua mertua tercinta Ibu Siti Choiriyah (almh) dan Bapak H.

Bastomi (alm) atas dorongan semangat yang kuat, kebijaksanaan dan do'a semasa masih hidup.

9. Istriku Hj. Nurul Hidayati, SH., MH. yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
10. Anak-anakku Farah Amalia Irbah, Achmad Rafi Muqtada dan Achmad Faiq Adly yang telah memberiku semangat untuk menyelesaikan tesis ini
11. Teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat dan dorongan

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun telah dimaksimalkan dalam penelian yang dilakukan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan kepada para pembaca.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 28 Juni 2021

ttd

NURBAEDAH

ABSTRAK

Nurbaedah, 2021, Implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kediri, Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing: 1. Dr. H. Imam Annas Mushlih, MHI. 2. Dr. H. Ilham Tohari, MHI.

Kata Kunci: implementasi, Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama

Adanya perceraian mempunyai akibat hukum, salah satunya terkait pembagian harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Terdapat putusan hakim dengan menggunakan dan dengan tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu Putusan Perkara Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Kdr dan Putusan Perkara Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu Putusan Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2015/PT.Sby. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tahapan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama dengan menggunakan dan dengan tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, karena termasuk kategori penelitian efektifitas hukum. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Kota Kediri dan berupa Putusan terkait sengketa harta bersama. Analisis data kualitatif menggunakan deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan.

Hasil penelitian mengungkapkan 1) tahapan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri yaitu jika tidak terjadi mediasi maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian oleh penggugat dan tergugat, pemeriksaan setempat, kesimpulan, dan Putusan Pengadilan. 2) Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama dengan menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Perkara Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Kdr dan Putusan Perkara Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Selain Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini majelis hakim juga menggunakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 3) Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengadili dan memutus sengketa harta bersama dengan tidak menggunakan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2015/PT.Sby, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan, kurang adil apabila Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diterapkan.

ABSTRACT

Nurbaedah, 2021, Implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kediri, Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing: 1. Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI. 2. Dr. H. Ilham Tohari, MHI.

Kata Kunci: implementasi, Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama

The existence of divorce has legal consequences, one of which is related to the distribution of joint property obtained by husband and wife during marriage. The distribution of joint property is regulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law. There is a judge's decision using and not using the basis of Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The decision of the Religious Court of Kediri City on the basis of Article 97 of the Compilation of Islamic Law, namely the Decision on Case Number 0398/Pdt.G/2019/PA.Kdr and Decision on Case Number 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Meanwhile, the decision of the Kediri City Religious Court that did not use the basis of Article 97 of the Compilation of Islamic Law, namely the Decision on Case Number 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr which was strengthened by the Decision of the Surabaya Religious High Court Case Number 0086/Pdt.G/2015/PT. Sby. This study aims to examine and analyze the stages of settlement of joint property disputes at the Religious Court of Kediri City and the legal considerations of the Judges of the Religious Courts of Kediri City in adjudicating and deciding joint property disputes by using and not using the basis of Article 97 of the Compilation of Islamic Law.

This study uses a sociological approach, because it belongs to the category of legal effectiveness research. The research data was obtained from interviews with the clerks of the Religious Court of Kediri City and in the form of decisions related to joint property disputes. Qualitative data analysis used worded descriptions of the findings.

The results of the study reveal 1) the stages of resolving joint property disputes at the Religious Court of Kediri City, namely if there is no mediation then proceed with the reading of the lawsuit, the defendant's answer, the plaintiff's replica, the defendant's duplicate, the evidence by the plaintiff and the defendant, local examination, conclusions, and court decisions. . 2) Legal considerations of the Kediri Religious Court judges in adjudicating and deciding joint property disputes using the basis of Article 97 of the Compilation of Islamic Law in Case Decision Number 0398/Pdt.G/2019/PA.Kdr and Case Decision Number 0320/Pdt.G/2019 /PA.Kdr. In addition to Article 97 of the Compilation of Islamic Law, in this case the panel of judges also used the provisions of Article 89 paragraph (1) of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. 3) Legal considerations of the Kediri City Religious Court Judges in adjudicating and deciding joint property disputes without using the basis of Article 97 of the Compilation of Islamic Law in the Decision of the Religious Court of the City of Kediri Case Number 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr and the Decision of the Surabaya High Religious Court Case Number 0086/Pdt.G/2015/PT.Sby, the panel of judges considers that based on the facts before the trial, it is unfair if Article 97 of the Compilation of Islamic Law is applied.

الملخص

Nurbaedah, 2021, Implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kediri, Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing: 1. Dr. H. Imam Annas Mushlih, MHI. 2. Dr. H. Ilham Tohari, MHI.

التنفيذ ، تجميع الشريعة الإسلامية ، تقسيم الملكية المشتركة :الكلمات المفتاحية

للطلاق عواقب قانونية ، تتعلق إحداها بتوزيع الملكية المشتركة التي حصل عليها الزوج والزوجة أثناء الزواج. يتم تنظيم توزيع الملكية المشتركة في المادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية. هناك قرار قاضٍ باستخدام أساس المادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية وعدم استخدامه. قرار المحكمة الدينية لمدينة كيديري على أساس المادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية ، أي القرار في القضية رقم 0398 / Pdt.G / 2019 / PA.Kdr. والقرار في القضية رقم 0320 / Pdt.G / 2019 / PA.Kdr. / الوقت نفسه ، فإن قرار المحكمة الدينية لمدينة كيديري الذي لم يستخدم أساس المادة 97 من مجموعة الذي تم / Pdt.G / 2014 / PA.Kdr. / الشريعة الإسلامية ، وهو القرار المتعلق بالقضية رقم 0168 / Pdt.G / 2015 / PT. Sby. / تعزيزه بقرار من رقم القضية لمحكمة سورابايا الدينية العليا 0086 تهدف هذه الدراسة إلى فحص وتحليل مراحل تسوية نزاعات الملكية المشتركة في المحكمة الدينية لمدينة كيديري والاعتبارات القانونية لقضاة المحاكم الدينية لمدينة كيديري في الفصل والبت في نزاعات الملكية المشتركة باستخدام و عدم استخدام أساس المادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية يستخدم هذا البحث منهجًا اجتماعيًا ، لأنه ينتمي إلى فئة أبحاث الفعالية القانونية. تم الحصول على بيانات البحث من المقابلات مع رئيس القضاة والقضاة وكتابة المحكمة الدينية لمدينة كيديري وفي شكل قرارات تتعلق بنزاعات الملكية المشتركة. يستخدم تحليل البيانات النوعي أوصافًا مصاغة للنتائج كشفت نتائج الدراسة: (1) مراحل حل نزاعات الملكية المشتركة بالمحكمة الدينية لمدينة كيديري ، أي في حالة عدم وجود وساطة ، ثم المضي قدما في قراءة الدعوى ، وإجابة المدعى عليه ، ورد المدعي ، ونسخة المدعى عليه ، - بينة المدعي والمدعى عليه ، والفحص المحلي ، والاستنتاج ، وقرار المحكمة. (2) الاعتبارات القانونية لقضاة محكمة كيديري الدينية في الفصل والبت في نزاعات الملكية المشتركة / Pdt.G / باستخدام أساس المادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية في قرار القضية رقم 0398 / Pdt.G / 2019 / PA.Kdr. / وقرار القضية رقم 0320 / Pdt.G / 2019 / PA.Kdr. بالإضافة إلى المادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية ، في هذه الحالة ، استخدم فريق القضاة أيضًا أحكام المادة 89 فقرة (1) من القانون رقم 7 لعام 1989 بشأن المحاكم الدينية. (3) الاعتبارات القانونية لقاضي المحكمة الدينية لمدينة كيديري في الفصل والبت في نزاعات الملكية المشتركة دون استخدام أساس المادة 97 من مجموعة / Pdt.G / الشريعة الإسلامية في قرار المحكمة الدينية لمدينة كيديري القضية رقم 0168 / Pdt.G / 2015 / PT.S / وقرار المحكمة الدينية العليا في سورابايا رقم 0086 / 2014/PA.Kdr. / ترى هيئة القضاة أنه بناءً على الحقائق قبل المحاكمة ، فإنه من غير العدل إذا كانت المادة 97 من By ، يتم تطبيق جميع الشريعة الإسلامية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
المخلص	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	10
B. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	22
C. Harta Bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	26

D. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam	27
E. Asas <i>Contra Legem</i> dalam Putusan	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Kehadiran Peneliti	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data	36
E. Prosedur Pengumpulan Data	37
F. Pengecekan Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data	38
1. Pengadilan Agama Kota Kediri	38
2. Tahapan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri	49
3. Putusan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri	51
B. Temuan Penelitian	64

BAB V PEMBAHASAN

A. Tahapan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri	69
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Mengadili dan Memutus Sengketa Harta Bersama Dengan Menggunakan Dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam	72
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Mengadili dan Memutus Sengketa Harta Bersama Dengan Tidak Menggunakan Dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam	74

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Teoritis dan Praktis	83
C. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kota Kediri	42
Tabel 4.2 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri	45
Gambar 4.2 Tahap Pemeriksaan Perdata	49